

**AKTUALISASI PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM MENGHAYATI
DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA
GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

Untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terlepas adanya ketahanan di bidang Ideologi. Ketahanan di bidang ideologi bangsa Indonesia ditujukan untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara.

Keampuhan Pancasila sebagai ideologi Negara tergantung kepada nilai-nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi, sebagai makhluk sosial maupun sebagai warga Negara sebagai kodrat dan irodat Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian nilai tersebut tidak identik dengan agama, tetapi mempunyai keterkaitan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian nilai tersebut adalah kongkretisasi dari ajaran semua agama dan berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antarumat beragama yang menciptakan kekuatan keagamaan, baik secara mental maupun spiritual di dalam Ketahanan Nasional.

Nilai tertinggi tersebut menjwai dan meliputi nilai-nilai sila berikutnya dalam Pancasila. Di dalam nilai kemanusiaan misalnya, tersimpul cita-cita kemanusiaan yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus

menjamin adanya toleransi, tolong menolong, hormat-menghormati yang dilandasi jiwa gotong royong.

Nilai Persatuan Indonesia merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan Indonesia yang terutama bersifat persatuan spiritual dan merupakan paduan hasrat untuk hidup bersama di dalam kesukaan, penderitaan dan sepenanggungan. Persatuan nasional, intelegensi dan dinamik merupakan anasir utama bagi bangsa yang menginginkan kemajuan, sedangkan nilai kerakyatan dijemakan oleh persatuan yang riil dan wajar, sedangkan kedaulatan berada di tangan rakyat atas dasar musyawarah untuk mufakat. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki dan pimpinan tanpa demokrasi akan mengarah ke diktatur. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepemimpinan dengan kerakyatan yang sudah dijiwai oleh persatuan spiritual (nasional) berlandaskan pada nilai Ketuhanan yang mutlak. Inilah yang disebut sebagai demokrasi Pancasila.

Meskipun Pancasila telah diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai falsafah dan dasar negara, namun pengakuan dan penerimaan saja belum tentu menjamin terhadap Ketahanan Nasional di bidang ideologi. Untuk mencapai Ketahanan Nasional diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh dan benar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila merupakan *way of life* bangsa Indonesia.

Pelaksanaan Ideologi Pancasila yang bersifat obyektif, adalah pelaksanaan di dalam Undang Undang Dasar dan peraturan hukum di bawahnya serta segala kegiatan penyelenggara negara, sehingga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan pelaksanaan bersifat subyektif, yaitu pelaksanaan oleh pribadi perorangan yang berarti pula bahwa segala perbuatan dan tindakan masyarakat Indonesia mencerminkan yang dikehendaki oleh Pancasila. Semakin tinggi kesadaran dan ketaatan bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka semakin tinggi pula ketahanan nasional di bidang ideologi.

Apabila melihat beberapa peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, baik perkelaian antar mahasiswa, adu pukul di antara anggota dewan yang terhormat, tawuran antarwarga desa, carut marutnya kepastiann hokum, baik pada aparat penyelenggara pemerintah maupun “mafia hukum” yang menyita perhatian publik, akan memunculkan beberapa pertanyaan antara lain; Bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini dalam mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila ? Sudah bergeserkah pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ? Atau sudah cukupkah bangsa Indonesia memandang Pancasila dengan sebuah pengakuan dan penerimaan dalam menjamin ketahanan nasional Indonesia sebagai dasar dan sebuah ideologi ?

Tidak bisa dipungkiri dengan sederet pertanyaan tersebut yang pada kenyataannya telah mengundang keprihatinan serius terhadap sebuah Ideologi Pancasila yang mengandung nilai sakral, bahkan sarat dengan norma luhur telah dipandang sebelah mata oleh sebagian komponen bangsa, bahkan sebagian masyarakat telah mengalami degradasi moral dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, apabila dihadapkan dengan kenyataan beberapa fenomena dinamika dalam kehidupan masyarakat di setiap harinya.

Beberapa kejadian yang sangat memilukan bahkan memalukan reputasi sebuah bangsa Indonesia yang sejak awal dikenal sebagai bangsa yang santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung nilai-nilai adat-istiadat yang penuh toleransi, serasa luntur ditelan bahkan digilas sebuah perilaku yang sangat tidak berperikemanusiaan, tidak beradab, sadis, bertindak anarkis, saling membunuh sesama kaum, tetangga, saudara sendiri, yang terjadi tanpa memandang strata, golongan, status sosial, bahkan mempengaruhi terhadap kehidupan secara universal.

Berawal dari fenomena di atas, maka diperlukan sebuah pemikiran atau gagasan yang diharapkan dapat digunakan sebagai instrospeksi terhadap strategi membina masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, agar ke depan bangsa Indonesia lebih beradab, maju dan

disegani, bahkan mampu meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat nasional maupun internasional.

2. Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan naskah ini untuk memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat Indonesia terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi di tengah arus dinamika global, dengan tujuan sebagai salah satu masukan atau sumbang saran kepada Pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan strategi pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna tetap menjaga kedaulatan NKRI.

3. Ruang Lingkup. Penulisan naskah karya tulis teritorial ini dibatasi pada pembahasan tentang aktualisasi pembinaan masyarakat terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama dalam menanamkan wawasan kebangsaan.

4. Metode dan Pendekatan. Penulisan naskah karya tulis teritorial ini menggunakan metode induktif, deduktif dan analisis secara deskriptif serta menggunakan pendekatan empiris berdasarkan studi kepustakaan berbagai referensi yang relevan.

5. Sistematika. Sistematika penulisan naskah karya tulis teritorial ini dengan menggunakan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan.
- b. Bab II Landasan Pemikiran.
- c. Bab III Kondisi Pembinaan Masyarakat Saat Ini.
- d. Bab IV Pengaruh Lingkungan Strategis.
- e. Bab V Kondisi Pembinaan Masyarakat Yang Diharapkan.
- f. Bab VI Aktualisasi Dalam Pembinaan Masyarakat Terhadap

Nilai- nilai Ideologi Pancasila.

g. Bab VII Penutup.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum. Di dalam pembahasan bab ini tidak terlepas adanya landasan pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam menuangkan gagasan atau ide dan beberapa teori yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, guna mendapatkan solusi atau jalan keluar, terutama penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar pemikiran dan teori yang digunakan antara lain ; Sejarah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Teori Kepemimpinan dan Teori Sinergitas.

7. Sejarah Pancasila. Istilah Pancasila yang dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno (Bung Karno) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 dengan menyampaikan usulan dasar-dasar yang dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk dengan disebut Pancasila (ejaan lama *Pantja* = lima, dan *sila* = dasar, sehingga artinya lima dasar).¹

Ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya pemikiran, konsep atau gagasan dan kata *logos*, yang artinya pengetahuan. Secara sederhana ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan atau gagasan. Secara lebih luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

¹ Buku Kewarganegaraan. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Penerbit Yudhistira. Jakarta. 2005.hal. 5.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan landasan Bangsa Indonesia dalam membentuk NKRI untuk mencapai tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan; dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Pancasila sendiri tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi nasional yang pada hakikatnya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai dasar ideologi yang dapat menampung dan mewadahi kebhinekaan aspirasi dari seluruh bangsa Indonesia.

8. Undang Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan keputusan politik bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam norma-norma konstitusional untuk menentukan sistem dan bentuk negara serta pemerintahan yang demokratis. Di dalam Pembukaan UUD 1945 memuat maksud didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita-cita, tujuan serta dasar negara yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Di dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.²

9. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya beserta udara dan ruang angkasa di atasnya. Wawasan Nusantara tersebut selalu menjiwai bangsa Indonesia dalam hidup dan kehidupan nasional maupun internasional³.

² UUD 1945. hal. 7.

³ Lemhannas. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Penerbit. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1992.

Wawasan Nusantara secara jelas dapat memberikan jaminan terwujudnya persatuan dan kesatuan serta kepentingan nasional, sehingga Wawasan Nusantara merupakan ajaran dasar yang memberikan arah dan gambaran yang jelas tentang kelangsungan hidup bangsa sekaligus perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Wawasan Nusantara mempunyai ciri - ciri atau sifat sebagai berikut :

- a. Manunggal. Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggalakan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Utuh menyeluruh. Utuh dan menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

10. Teori Pendukung

a. Teori Kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kaitannya dengan moral dan perilaku yang etis serta profesional bagi segenap komponen bangsa Indonesia, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa pendapat tentang kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Menurut George P. Terry, kepemimpinan merupakan aktivitas yang mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan pekerjaan dengan penuh kemauan, guna mencapai tujuan organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik, suatu organisasi dapat menghasilkan karya yang bermanfaat.
- 2) Menurut William A. Cohen, kepemimpinan adalah merupakan seni yang mengarahkan orang lain untuk melakukan

kerja maksimal guna menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proyek.

Apabila ditinjau dari aspek kepemimpinan tersebut, pada dasarnya menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan aspek yang sangat berpengaruh di dalam mewujudkan profesionalisme dan jatidiri bangsa dalam mencapai keberhasilan setiap panggilan tugas bangsa dan negara.

b. Teori Sinergitas.² Menurut teori sinergitas, bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Defensif.* Tingkat kerjasama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif.
- 2) *Respectfull.* Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
- 3) *Sinergistic.* Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Adaya keterpaduan dan sinergitas di antara seluruh komponen bangsa terutama dalam pembinaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, diharapkan akan dapat mewujudkan ketahanan nasional dalam bingkai dan kedaulatan NKRI.

⁴ A F. Stones James, *Management*, (dalam R. Sulistiyadi. Majalah Seskoal). Jilid I Edisi 2.

BAB III

KONDISI MASYARAKAT DALAM MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA SAAT INI

11. Umum. Dalam bab ini, merupakan gambaran atau kondisi masyarakat, terutama dalam menghayati dan mengamalkan terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila oleh sebagian komponen bangsa, yang dianggap sebagai inti permasalahan yang diperlukan pemecahan bersama seluruh komponen bangsa lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya penguatan dan integritas kesatuan bangsa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia, agar tetap terjaganya serta tegak utuhnya kedaulatan Negara dalam bingkai NKRI.

12. Kondisi Masyarakat Saat Ini.

Kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya

pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara.

Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.⁴

Cara pandang yang berwawasan nusantara pada masa-masa ini bisa dikatakan sudah luntur dan hampir berada pada titik terendah pada diri sikap anak bangsa ini. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat dalam konflik dan terpecah-belah. Banyak di antara mereka yang terjebak dalam sekat-sekat primordialisme dan terpecah dalam golongan suku, ras, agama, daerah dan kepentingan yang sempit. Mencermati perilaku seperti itu, dapat dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat patriotisme bangsa mulai luntur dan longgar, bahkan hampir sirna. Bahkan akhir-akhir ini telah berkembang pula sebuah kesadaran etnis yang sempit berupa tuntutan pemisahan wilayah dari beberapa daerah, seperti tuntutan referendum seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah yang tidak dipahami secara mendalam.

Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya penghayatan nilai rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan menurun, antara lain pada :

⁴ Jederal TNI (Purn) Edi Sudrajat, " *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional : Satu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam*" . Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor II (3), Desember 1997, hal.8.

a. Rasa Kebangsaan. Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini masih dirasakan jauh untuk menggapainya, karena lunturnya rasa kebangsaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai peristiwa, baik perasaan mudah tersinggung yang mengakibatkan emosional tinggi yang berujung pada pembunuhan, bahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus yang setiap tahun dirayakan kurang menggema, karena kurangnya penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila. Di samping itu, adanya tuntutan sekelompok masyarakat dengan isu putra daerah terutama dalam Pilkada masih terjadi amuk massa dengan kepentingan sektoral, sehingga akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan nasional terhambat.

b. Paham Kebangsaan. Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Dalam mewujudkan paham tersebut belum diimbangi adanya legitimasi terhadap sistem pendidikan secara nasional, bahkan masih terbatas muatan lokal, sehingga muatan nasional masih diabaikan. Tidak adanya materi pelajaran Moral Pancasila atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) atau sertifikasi terhadap Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di setiap strata pendidikan, baik formal, nonformal, maupun di masyarakat luas.

c. Semangat Kebangsaan. Belum terpadunya semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Hal ini tercermin pada sekelompok masyarakat mulai luntur dalam memahami adanya pluralisme, karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri atas bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda, serta tidak menghapus kebhinekaan,

melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinekaan sebagai dasarnya.

Penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam wawasan kebangsaan yang dirasakan saat ini, belum mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Padahal dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bentuk wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di segala aspek kehidupan maupun di segala bidang.

13. Implikasi Terhadap Strategi Pembinaan Masyarakat Dalam Menghayati dan Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila.

Apabila dicermati adanya beberapa fenomena peristiwa pada kehidupan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah pada akhir-akhir ini, baik berupa perkelahian massal antar kelompok kepentingan akibat pemekaran wilayah, berebut lahan kehidupan, selisih paham antar pemuda /pelajar termasuk mahasiswa dan lainnya, merupakan bukti konkrit adanya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bentuk wawasan kebangsaan sudah menurun.

Melihat perkembangan Wawasan Kebangsaan yang dimiliki komponen bangsa saat ini, apabila dibiarkan dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini akan berimplikasi terhadap hal-hal sebagai berikut ini.

- a. Tidak terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama paham kebangsaan.
- b. Tidak terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama rasa kebangsaan.
- c. Tidak terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama semangat kebangsaan.

Adanya indikasi menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama paham, rasa dan semangat kebangsaan tersebut, akan sangat mempengaruhi di dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Permasalahan Yang Dihadapi

Masih adanya sebagian masyarakat yang belum menghayati, memahami dan mengamalkan secara utuh terhadap nilai-nilai Pancasila terutama tentang wawasan kebangsaan yang terdapat rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB IV

PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum. Dalam menghayati dan mengamalkan terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila yang merupakan pedoman dan petunjuk jalan dalam menentukan rambu-rambu tujuan bangsa dan negara Indonesia oleh seluruh komponen bangsa, tidak terlepas adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

16. Global. Globalisasi secara harfiah berarti "mendunia". Dunia menjadi semakin terbuka, negara-negara menjadi saling terhubungkan (*interconnected*) dan ditandai oleh saling ketergantungan, sehingga mempunyai dampak atau pengaruh yang tidak mengenal batas-batas negara (*borderless*)⁵. Era globalisasi telah membuka berbagai keterkaitan antarnegara, sehingga hampir tidak ada satu negarapun yang bebas dari pengaruh negara-negara lainnya.

Globalisasi telah menimbulkan terjadinya perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia, karena karakteristiknya yang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Era ini disebut juga sebagai era teknologi informasi, yang menjadi salah satu karakter utama arus globalisasi yang melanda dunia. Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga transparansi informasi dunia terkesan tanpa batas antarnegara, bahkan peran mass media sangat berpengaruh dalam pembentukan berbagai opini publik.

Berbagai perkembangan dunia yang bersifat global ini, akhirnya berinteraksi langsung dengan kondisi nasional Indonesia yang memperkuat potensi ke arah disintegrasi bangsa, apabila tidak disikapi dengan membangun karakter bangsa melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Ideologi

⁵DR. J. KALOH, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002), hal. 30.

Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara sekaligus sebagai filter terhadap dinamika global. Konflik horizontal dalam masyarakat yang mengedepankan isu SARA dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang kurang, akan menimbulkan terhadap gangguan stabilitas dan keamanan nasional, terutama nilai dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara lainnya dalam pergaulan masyarakat internasional. Namun pada sisi yang lain, pesatnya kemajuan teknologi informasi juga mengakibatkan masuknya pengaruh-pengaruh budaya negatif dari luar negeri yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kondisi wawasan kebangsaan segenap komponen bangsa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Globalisasi merupakan proses transparansi dan menjadikan ruang dan waktu semakin sempit, sehingga menjadikan dunia sebagai satu keseluruhan, bahkan sebagai rangkaian manifestasi kehidupan baru. Kehidupan global yang mengarah kepada percepatan proses modernisasi telah membawa dampak besar terhadap corak kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi.

Dalam dinamika kehidupan global tersebut telah terjadi pergeseran nilai-nilai. Nilai universal yang seharusnya dijunjung tinggi, telah bergeser menjadi nilai-nilai sesaat, karena sebuah tuntutan dengan lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pergeseran nilai-nilai khususnya yang menyangkut nilai budaya dan karakter bangsa sebagai akibat dinamika kehidupan global tersebut, telah membuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila terutama pemahaman wawasan kebangsaan oleh sebagian komponen bangsa menjadi luntur dan longgar, sehingga menyebabkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa telah bergeser bahkan cenderung diabaikan.

17. Regional. Pengaruh dan dinamika yang terjadi di negara-negara tetangga sebagai mandala kawasan, akan ikut mewarnai terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah perbatasan antarnegara tetangga, sehingga akan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan terhadap pertahanan negara. Oleh karena itu, penanaman kesadaran belanegara yang didasari adanya geografis negara kepulauan.

Perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Faktor-faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah permasalahan hubungan antar negara di kawasan, antara lain Cina, Jepang, Singapura dan Malaysia.

a. Cina. Perkembangan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) yang pesat telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting secara regional maupun global. Untuk mempertahankan kemajuan yang telah diperolehnya, maka upaya memenuhi kepentingan nasional Cina akan menjangkau berbagai belahan dunia. Pemenuhan kepentingannya itu akan dilakukan dengan menggunakan instrumen hubungan internasionalnya. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan, karena Cina memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan, terutama dalam pengaruh ideologi melalui penguasaan ekonomi pasar bebas .

b. Jepang. Jepang, merupakan negara yang kuat di bidang ekonomi, negara pemasok hasil industri, serta pengimpor terkemuka atas minyak dan gas bumi. Perekonomian Jepang menjangkau seluruh pelosok dunia dan perdagangan internasionalnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Pada umumnya keamanan perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh keamanan wilayah perdagangan internasionalnya, sehingga Jepang sangat memperhatikan keamanan regional dan global. Oleh karena itu, Jepang memiliki kepentingan yang kuat atas stabilitas keamanan dunia dan memiliki pengaruh dalam upaya mewujudkan keamanan regional dan global, sehingga sikap politiknya selalu diperhitungkan negara-negara besar dunia dan merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.

c. Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia dan juga merupakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Saat ini Malaysia merupakan negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selain Arab Saudi dan Hongkong. Namun permasalahan yang sering muncul terkait dengan masalah TKI ini adalah “ketegasan” pemerintah Malaysia yang terkadang sering melakukan tindakan di luar batas terhadap TKI terutama mereka yang tergolong ilegal. Selain tidak segan-segan untuk menghukum para TKI ini, pemerintah Malaysia juga sering mendeportasi TKI ilegal secara paksa yang terkadang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Indonesia.

Di samping masalah TKI, Malaysia juga tercatat sebagai negara yang paling “bermasalah” dengan Indonesia terutama dalam hal penentuan garis batas wilayah perairan. Kasus Ambalat yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi pelajaran bagi Indonesia tentang pentingnya ketegasan dan keunggulan diplomasi dalam penentuan garis batas perairan Indonesia. Hilangnya Sipadan dan Ligitan yang sempat “dicaplok” Malaysia juga harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam usahanya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, sehingga pendidikan PPBN dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara berdasarkan karakteristik geografis negara kepulauan sangat perlu untuk lebih dioptimalkan.

d. Singapura. Sebagai salah satu negara Asean yang tergolong maju, Singapura saat ini sering dijadikan tempat “persembunyian” yang aman bagi warga negara Indonesia yang “bermasalah” terutama untuk mereka yang mendapat predikat “koruptor”. Tidak adanya kerjasama bilateral dalam penanganan orang-orang bermasalah ini sering menjadi batu sandungan antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian kasus-kasus koruptor ini.

Perkembangan lain di Singapura yang sangat berpengaruh terhadap Indonesia adalah upaya Singapura yang ingin memperluas wilayah daratannya dengan cara mereklamasi pantai. Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah Singapura ini karena bahan utama perluasan pantai menjadi daratan ini diambil dari Indonesia bahkan sebagian besar diambil secara ilegal yakni pasir laut. Dengan metode “belalai gajah” pipa-pipa pengeruk pasir laut bertebaran di sejumlah perairan Indonesia yang berdekatan dengan Singapura. Kegiatan ini jelas merugikan Indonesia karena dilaksanakan secara ilegal. Masalah ini hingga 2007 masih dalam pembahasan antara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, pendidikan PPBN dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara berdasarkan karakteristik geografis negara kepulauan perlu lebih dioptimalkan di seluruh strata pendidikan secara nasional.

18. Nasional. Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang cenderung bersifat stagnan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di masa depan dengan dasar - dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara internal, tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta

akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang dianggap telah menyimpang.

Keberhasilan yang diraih pemerintah di bidang pembangunan ekonomi, telah meningkatkan harapan dan tuntutan masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Namun pada sisi lain masyarakat cenderung kurang sabar dan menginginkan peningkatan penghasilan kesejahteraannya secara cepat (*instant*), sementara tuntutan masyarakat selalu lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan untuk memenuhinya. Terlebih lagi dengan adanya kemelut mavia peradilan dan hukum para birokrasi pemerintah yang diduga mewarnai jalanya proses hukum telah menyedot perhatian publik sebagai akibat kurangnya transparansi dan kesadaran hukum secara mendalam. Di samping itu, kenaikan harga BBM pada waktu itu, telah memicu adanya gejolak masyarakat dalam bentuk berbagai aksi massa yang menentang terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Di sisi lain pemerintah akan memberikan dana kompensasi terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam bentuk pengobatan gratis dan beasiswa. Kondisi dan tuntutan masyarakat tersebut apabila dimanipulasi, diagitasi dan dimobilisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mudah meletupkan gejolak dan kerusuhan sosial⁶.

Dalam bidang politik, pemahaman politik oleh sebagian komponen bangsa telah memacu kepedulian terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada sisi yang lain, akibat adanya pemahaman politik secara sempit yang diakibatkan belum adanya kedewasaan berpolitik, dapat menimbulkan kecenderungan mengentalnya kotak-kotak dalam masyarakat yang berpotensi menjadi konflik. Konflik politik yang bersifat horisontal akan sangat mempengaruhi aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang menjadi kerawanan sosial dan menciptakan instabilitas nasional yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

⁶Ibid, hal. 19.

Bangsa Indonesia yang majemuk atau heterogen dengan keanekaragaman suku, etnis, agama, bahasa dan adat istiadat, apabila dikelola dengan baik dan proses sosialisasi keindonesiaannya terus digencarkan, terutama melalui pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, maka hal tersebut merupakan sumber kekuatan bangsa yang sangat potensial guna mewujudkan pembangunan nasional. Sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan dapat memunculkan ancaman disintegrasi yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

19. Peluang dan Kendala. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka diperoleh peluang dan kendala yang muncul dalam faktor-faktor eksternal dan internal sebagai berikut :

a. Peluang.

- 1) Globalisasi yang melanda seluruh dunia, telah berdampak dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga mempengaruhi terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Derasnya arus global tersebut, telah mendorong proses penyatuan umat manusia terutama dalam visi, misi dan cita-cita dalam memperjuangkan nilai-nilai universal, baik demokratisasi, kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, yang menuntut adanya akuntabilitas, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat mewujudkan *good publick governance* di sektor pemerintahan/Negara, *good corporate governance* di sektor swasta dan *good civil society governance* di lingkungan masyarakat.⁷
- 2) Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan setiap individu memperoleh kemudahan informasi dari seluruh penjuru

⁷ Bibit Samad Riyanto. *Orasi Ilmiah. Optimalisasi Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Praktek Administrasi Negara*. (Naskah dalam wisuda Program Magister ke-7 dan Program Sarjana S1 ke-46 STIA LAN RI). Jakarta.2009.hal 9.

dunia dengan sangat cepat, sehingga merupakan peluang dalam mengakses setiap perkembangan yang terjadi baik di pemerintah tingkat pusat maupun daerah yang dapat meningkatkan arus komunikasi secara langsung dan terintegrasi dengan baik.

3) Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui desentralisasi telah memberikan peluang besar bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mempercepat jalannya pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Kendala.

1) Proses globalisasi apabila tidak disikapi dengan arif akan berdampak pada nilai-nilai liberal yang individualisme dan mempengaruhi bahkan mengancam terhadap semangat kebangsaan, jati diri dan sistem kehidupan Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Kondisi politik di Indonesia yang masih diwarnai dengan kepentingan politik partai, mengakibatkan kurangnya respon dari para elit politik terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lambatnya pemulihan krisis di berbagai bidang yang sedang dialami bangsa Indonesia. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga loyalitas kepada negara dan wawasan kebangsaan masyarakat menjadi menurun.

3) Adanya tuntutan yang berlebihan dari beberapa daerah kaya sumber daya alam atas nama kebebasan dan ketidakadilan, sehingga menumpahkan kekecewaannya kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk tuntutan kemerdekaan, sehingga mengancam terhadap keutuhan NKRI.

4) Potensi konflik horizontal antardaerah yang menyangkut tapal batas daerah, pengelolaan dan pengaturan wilayah laut, adanya tuntutan yang berlebihan dari beberapa daerah kaya sumberdaya alam serta sukuisme dan daerahisme sempit dengan isu putra daerah, dapat menimbulkan instabilitas yang bermuara pada disintegrasi bangsa.

BAB V

KONDISI MASYARAKAT DALAM MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG DIHARAPKAN

19 Umum. Penyelenggaraan pembinaan masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila terutama guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat mutlak diperlukan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pandangan seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat telah terjalin dengan solid adanya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pemahaman adanya wawasan kebangsaan yang terintegrasi dalam setiap nurani dan jiwa setiap insan sesuai yang diharapkan.

20. Kondisi Masyarakat Yang Diharapkan.

Dalam pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila terutama dalam wawasan kebangsaan tidak hanya merupakan tuntutan bagi bangsa dalam mewujudkan jati diri atau identitasnya saja, melainkan juga pembinaan tata lakunya sebagai suatu bangsa yang meyakini nilai-nilai hakiki yang dimilikinya. Cara pandang yang berwawasan nusantara pada masa-masa mendatang harus ditingkatkan pada diri setiap anak bangsa, karena kita tidak ingin lagi menyaksikan berbagai komponen bangsa ini terlibat konflik serta terjebak dalam sekat-sekat primordialisme dan serpihan-serpihan golongan suku, ras, agama, daerah maupun kepentingan yang lebih sempit dan bersifat sektoral. Tidak ada lagi ada sekelompok anak bangsa yang rela dan dengan rasa tidak bersalah mengenyampingkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa hanya untuk mendapatkan popularitas murahan, kedudukan ataupun materi.

Guna mewujudkan kondisi seperti ini, maka harus ditingkatkan ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini telah ada dalam diri setiap anak bangsa yang merupakan perwujudan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat

patriotisme bangsa. Nilai-nilai budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa harus dipertebal. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi berkembangnya kesadaran etnis yang sempit serta tuntutan pemisahan wilayah dari NKRI dengan mengatasnamakan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Wawasan Kebangsaan yang telah ada dalam diri setiap anak bangsa harus ditingkatkan, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini tetap terjaga keutuhannya, bahkan sudah final yang merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Nasionalisme merupakan salah satu unsur dalam pembinaan kebangsaan atau *nation building*. Dalam proses pembinaan kebangsaan semua anggota masyarakat bangsa dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tata-laku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Proses pembinaan kebangsaan berbeda bagi tiap bangsa dan bagi bangsa Indonesia yang plural dan heterogen akan lebih mengedepankan Wawasan Kebangsaan yang unsur-unsurnya adalah Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan yang harus dibina secara berlanjut dan sinergis, karena letak kekuatan penangkalannya justru di dalam kesinergisannya.

a. Rasa Kebangsaan. Rasa Kebangsaan merupakan suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa Kebangsaan yang membara dapat dijadikan modal dasar bagi upaya untuk membuat masyarakat bangsa dihormati dan disegani oleh bangsa lain di dunia. Dengan semakin meningkatnya Rasa Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa Indonesia, akan menjadikan semakin kuatnya nilai-nilai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Rasa Kebangsaan itulah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Rasa Kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu (warga negara) yang berada dalam wilayah NKRI, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, rasa kebangsaan merupakan perekat paling dasar dari setiap komponen bangsa yang karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan untuk menjadi satu dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu wadah negara bangsa (*nation state*).

b. Paham Kebangsaan. Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana suatu bangsa mewujudkan masa depannya. Melalui peningkatan Paham Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa Indonesia, akan sangat berpengaruh positif kepada visi warga negara tentang kemana bangsa ini harus dibawa ke masa depan.

Dalam implementasinya, Paham Kebangsaan Indonesia dalam bentuk Wawasan Nusantara yang mengamanatkan persatuan di berbagai bidang. Paham Kebangsaan tidak boleh dikekang secara konservatif, akan tetapi harus diberikan aktualisasi sesuai dengan perkembangan jaman. Paham Kebangsaan di samping memahami ciri hakiki bangsa juga mencakup pemahaman tentang ruang negara, karena bagaimanapun juga ruang negara merupakan salah satu dasar pengambilan kebijakan nasional maupun orientasi masyarakat di dalam menumbuh-kembangkan dirinya. Kesadaran terhadap ruang negara tertuang ke dalam geopolitik negara, yang dalam hal ini bagi bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Pemahaman warga negara tentang paham kebangsaan dengan dilandasi oleh pemahaman yang baik tentang Wawasan Nusantara yang bertujuan mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional.

c. Semangat Kebangsaan. Pengertian Semangat Kebangsaan atau nasionalisme, merupakan perpaduan atau sinergi dari Rasa Kebangsaan dan Paham Kebangsaan. Dengan peningkatan Semangat Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, akan semakin meningkatkan kemampuan bangsa untuk tetap bertahan hidup menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang serba cepat dan dinamis.

Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang tidak didasarkan atas persamaan kelahiran, kesukuan, asal-usul, keturunan, kedaerahan, ras ataupun keagamaan, tetapi didasarkan atas persamaan perasaan satu jiwa, satu asas spriritual yaitu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh pengorbanan yang telah dibuat pada masa lampau dan bersedia dibuat di masa depan serta kehendak hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai suatu bangsa untuk bersama-sama berjuang mencapai cita-cita bangsa. Kebangsaan Indonesia secara sadar mengakui dan memahami adanya pluralisme, karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri atas bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda serta tidak menghapus kebhinekaan, melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinekaan sebagai dasarnya. Guna menjaga NKRI tetap bersatu hingga akhir jaman, maka Semangat Kebangsaan perlu terus ditumbuhkembangkan, dipupuk dan dilembagakan pada semua tingkatan sosial masyarakat, secara utuh dan kolektif.

Wawasan Kebangsaan yang dimiliki oleh segenap komponen bangsa harus mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di bidang lain. Wawasan Kebangsaan harus tetap ada sebagai wujud nyata yang melembaga dari kesadaran nasional yang semakin menguat dan sebagai orientasi nilai yang

mampu memperkuat identitas dalam memberikan motivasi pembangunan nasional.

Wawasan Kebangsaan merupakan prinsip yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dalam mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini sesuai dengan teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa kebangsaan merupakan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang saling merasa setia kawan antara satu sama lain. Kebangsaan tidak dapat disamakan dengan yang didasarkan atas kesamaan ras, bahasa, agama, kepentingan bersama, geografi atau batas-batas alamiah permukaan bumi.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang bersinergi antara instansi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama, sehingga perpecahan dapat dihindari seminimal mungkin. Hal ini sejalan dengan teori sinergitas yang apabila dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak atau manfaat yang lebih baik.

21. Kontribusi Pembinaan Masyarakat Terhadap Pemahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Pancasila.

Dalam proses pembinaan masyarakat terhadap pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tata-laku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Proses pembinaan kebangsaan berbeda bagi tiap bangsa dan bagi bangsa Indonesia yang plural dan heterogen akan lebih mengedepankan wawasan kebangsaan yang unsur-unsurnya adalah Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan yang harus dibina secara berlanjut dan sinergis, karena letak kekuatan penangkalannya justru di dalam kesinergisannya. Kontribusi

dalam pembinaan masyarakat terhadap pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal maupun informal dapat dilaksanakan secara bersinergi, maka rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga.
- b. Pelaksanaan pembangunan dengan berwawasan kebangsaan dan dengan penerapan sistem desentralisasi sesuai UU Otonomi Daerah telah membawa peningkatan yang sangat berarti pada pemberdayaan masyarakat, pada pelayanan terhadap masyarakat dan pada kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya dapat mempererat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kedaulatan NKRI tetap terjaga.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah selain menjanjikan harapan kemakmuran dan kemandirian daerah, akan berkontribusi terhadap adanya upaya mencegah bahaya disintegrasi bangsa. Kondisi ini muncul akibat dari masyarakat di daerah-daerah yang pada akhir-akhir ini telah nampak adanya upaya dalam turut menyukseskan pembangunan nasional demi kemakmuran bersama, sehingga munculnya konflik horizontal terhadap implementasi PP No.6 Tahun 2005 tentang Pilkada misalnya, dapat dihindari atau paling tidak dapat dieliminir.

22. Indikator Keberhasilan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari upaya pembinaan masyarakat dalam memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan wawasan kebangsaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu ditentukan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi pembinaan tersebut. Indikator tersebut, antara lain :

- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dengan baik, sehingga

perpecahan akan terhindar serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga.

b. Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kebangsaan telah dapat diterapkan dengan sistem desentralisasi yang membawa peningkatan pada pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga.

c. Pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM dapat berjalan dengan baik dan dapat mencegah munculnya konflik horizontal, sehingga bahaya disintegrasi bangsa dapat dihindari.

d. Perhatian Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk sosialisasi terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui sertifikasi pendidikan formal maupun informal dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar pada seluruh lapisan masyarakat atau seluruh komponen bangsa.

e. Pemahaman yang mendalam terhadap visi dan orientasi yang jelas akan membawa pada pelaksanaan pembangunan SDM lebih baik dan membawa kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

f. Seluruh instansi dan komponen bangsa terkait bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat Indonesia guna memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menghindari dan bahkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul yang pada akhirnya dapat hidup berdampingan penuh toleransi.

BAB VI

AKTUALISASI PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA

23. Umum. Aktualisasi pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan diarahkan untuk mewujudkan wawasan kebangsaan yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan secara bulat, utuh dan sinergis yang tertanam pada setiap komponen bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan, strategi dan upaya nyata dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

24. Kebijakan.

Kebijakan yang digariskan dalam pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk mewujudkan Wawasan Kebangsaan yang meliputi Paham Kebangsaan, Rasa Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan secara bulat, utuh dan sinergis yang tertanam pada setiap individu komponen bangsa.

Kebijakan ini diperlukan guna memperkuat integritas NKRI dan meraih kesetiaan rakyat sebagai komponen bangsa, sehingga memiliki jiwa patriotisme dan kesetiaan yang mendalam kepada negara tercinta.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan upaya pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui pemahaman terhadap rasa, paham dan semangat kebangsaan di seluruh komponen bangsa, institusi dan

masyarakat Indonesia baik formal maupun informal guna tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI”.

25. Strategi. Guna mewujudkan kebijakan yang telah digariskan, perlu dirumuskan suatu strategi. Strateginya yang digunakan adalah pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi Paham Kebangsaan, Rasa Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan, sehingga diperoleh hasil yang optimal dan terfokus dengan benar terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini.

Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap kebijakan yang digunakan, maka disusunlah beberapa strategi sebagai berikut :

a. Strategi pertama : Mewujudkan kebijakan Pemerintah yang mendorong terhadap penyelesaian permasalahan menurunnya wawasan kebangsaan, dengan cara harus dibina secara bertingkat dan berlanjut, pada seluruh institusi dan komponen bangsa secara bersinergi. Hal ini sesuai dengan Teori Sinergitas yang menghasilkan komunikasi dalam kerjasama antarkomponen bangsa.

b. Strategi kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel pada seluruh institusi dan komponen bangsa yang memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme yang tinggi dengan meningkatkan adanya paham, rasa dan semangat kebangsaan melalui aplikasi penataran atau sertifikasi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara serta menciptakan suatu kondisi kehidupan sosial dan politik yang sehat.

c. Strategi ketiga : Mewujudkan pemahaman nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa melalui penerapan matapelajaran wajib Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di seluruh strata pendidikan negeri maupun swasta, formal maupun nonformal, agar

tertanam rasa, paham dan semangat kebangsaan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, sehingga kedaulatan NKRI tetap terjaga.

Agar strategi yang telah digariskan tersebut dapat dilaksanakan, maka terlebih dahulu ditentukan tujuan, sasaran, subyek, obyek, metode serta sarana dan prasarana yang akan digunakan.

a. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tercipta kondisi jiwa patriotisme yang mantap, kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara pada pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

b. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam strategi yang telah dirumuskan adalah meningkatnya Wawasan Kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa sebagai wujud dalam pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI dalam wujud :

- 1) Tertanamnya nilai-nilai Paham Kebangsaan, Rasa Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan (Nasionalisme) yang terkandung di dalam Wawasan Kebangsaan.
- 2) Terwujudnya semangat nasionalisme masyarakat dengan harga diri yang tinggi (*Pride*) sebagai bangsa yang besar dan terhormat.
- 3) Terciptanya sistem pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap keutuhan kedaulatan NKRI.
- 4) Meningkatnya taraf hidup masyarakat, agar kesejahteraan dan kemandirian daerah pada pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan, bermoral dan berwawasan kebangsaan.

6) Terciptanya dukungan dan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya integritas NKRI yang kuat.

c. Subyek. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui wawasan kebangsaan dengan menggunakan sarana prasarana yang ada dibantu oleh Institusi-institusi Pendidikan, Media Massa dan Lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang sosial (LSM).

d. Obyek. Yang menjadi obyek pembinaan masyarakat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah seluruh masyarakat Indonesia.

e. Metode. Metode yang digunakan dalam pembinaan masyarakat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk menanggulangi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, harus dilakukan secara simultan, berkesinambungan dan terarah melalui:

1) **Edukasi.** Dilaksanakan dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan pembelajaran kepada segenap komponen bangsa secara bertingkat dan berlanjut tentang kesadaran bela negara, Wawasan Nusantara, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bidang-bidang lain yang mendukung peningkatan Wawasan Kebangsaan.

2) **Sosialisasi.** Dilaksanakan dengan menyebarluaskan peraturan-peraturan dan sistem pembinaan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang perlu diketahui oleh segenap komponen bangsa dalam meningkatkan Wawasan Kebangsaan.

3) **Koordinasi.** Untuk meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

Pancasila, diperlukan koordinasi dan sinergitas yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi lain serta seluruh komponen bangsa. Di samping itu, perlu adanya pemahaman bahwa seluruh komponen bangsa mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak ada satupun komponen bangsa yang merasa memiliki posisi lebih penting daripada komponen bangsa yang lain.

4) **Legislasi.** Guna menanamkan Wawasan Kebangsaan diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang kuat, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang bersifat mengikat yang disetujui oleh DPR maupun DPRD.

5) **Evaluasi.** Dengan melaksanakan penilaian secara bertahap dan terus menerus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan hasil dari upaya yang telah dilaksanakan terutama pembinaan masyarakat terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan lingkungan strategis, sebagai umpan balik bila belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

f. Sarana dan Prasarana.

1) Sarana yang digunakan adalah semua perangkat keras (meliputi semua fasilitas pendidikan) dan piranti lunak milik pemerintah maupun lembaga suprastruktur dan infrastruktur lainnya (meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah).

2) Prasarana yang digunakan adalah semua fasilitas pendukung yang dimiliki pemerintah dan lembaga suprastruktur yang tersedia untuk mendukung dalam menanamkan wawasan kebangsaan di seluruh komponen bangsa.

26. Upaya. Upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam strategi di atas, antara lain:

a. Upaya untuk mendukung strategi pertama adalah :

Guna mewujudkan tertanamnya nilai-nilai Paham Kebangsaan, Rasa Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan (Nasionalisme) yang terkandung di dalam Wawasan Kebangsaan, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Institusi pendidikan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan pendekatan historis. Pendekatan historis tersebut penting, guna memberikan pengertian bahwa Wawasan Kebangsaan telah diperjuangkan oleh para pemuda Indonesia di masa lampau, sebagaimana yang telah diikrarkan oleh para pemuda tersebut pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam wujud Sumpah Pemuda. Hal tersebut sejalan dengan teori kebangsaan yang kemukakan oleh Ernest Renan, yang menyatakan bahwa *“Kebangsaan merupakan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan kesetia-kawanan, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat pada masa lampau (kesepakatan, keinginan nyata untuk hidup bersama) dan bersedia melanjutkannya di masa depan”*.

2) Terciptanya dukungan dan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya integritas NKRI yang kuat. Hal ini dapat diupayakan dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya NKRI. Bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, adanya konsep desentralisasi harus tetap dikembangkan dalam konteks negara kesatuan. Pemahaman ini dapat diwujudkan dengan cara antara lain:

- a) Meningkatkan kegiatan yang menimbulkan terjadinya interaksi antardaerah, sebagai contoh dengan adanya berbagai olah raga, antara lain; Pekan Olahraga Nasional, Pekan Kebudayaan Nasional, Liga Indonesia dan lain-lain.
- b) Menumbuhkan rasa persaudaraan antardaerah melalui rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan untuk bersama-sama berusaha bangkit dari keterpurukan.

b. Untuk mendukung terhadap upaya strategi kedua adalah, dengan menciptakan suatu kondisi kehidupan Sosial dan Politik yang sehat dengan cara :

- 1) Pemerintah selalu mengikuti dan merespon setiap perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat dengan matang, sehingga dapat diantisipasi guna mencegah terjadinya gejolak dalam masyarakat yang cenderung anarkhis apabila dibiarkan berlarut.
- 2) Membina kerukunan antarumat beragama atau golongan dengan menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme agama yang ada pada masyarakat dengan cara :
 - a) Menghilangkan diskriminasi terhadap golongan minoritas.
 - b) Menumbuhkan rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan yang bersama-sama berjuang menghadapi “musuh” yang akan menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Pemerintah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui :

a) Proses pembelajaran tentang unsur-unsur dari Wawasan Kebangsaan, yaitu Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan (Nasionalisme). Diperlukan suatu program yang aplikatif dan langsung menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan serta memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

b) Ketauladanan. Peningkatan Wawasan Kebangsaan juga harus dibarengi dengan ketauladanan dari pemimpin nasional dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Apabila para elit politik dan pemerintahan dapat memberikan ketauladanan dengan dilandasi jiwa persatuan dan kesatuan, lebih mementingkan bangsa dan negara serta mewujudkan keadilan, maka masyarakat akan lebih respek, loyal dan patuh kepada para pemimpinnya atau umaro'nya.

c) Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam meningkatkan Wawasan Kebangsaan, diperlukan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam bidang agama, sosial dan pemerintah dalam memberikan keyakinan kepada rakyat terhadap pentingnya peningkatan dan pembinaan Wawasan Kebangsaan.

d) Peningkatan dan peneguhan kembali komitmen bersama tentang Wawasan kebangsaan melalui program sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Terdapat tiga kerangka dasar program sosialisasi Wawasan Kebangsaan, yaitu:

- (1) Memahami dan menghormati setiap perbedaan sebagai suatu realitas yang ada dan akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Menerima semua perbedaan yang berada dalam wilayah Nusantara sebagai satu keutuhan, terpadu, saling melengkapi dan saling menghidupi.

(3) Rasa kecintaan kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala isinya yang beraneka ragam.

c. Untuk mewujudkan strategi ketiga terhadap pemahaman nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa, maka dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Pemerintah menerapkan matapelajaran wajib Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Pembinaan Bela Negara (PBN) melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di seluruh strata pendidikan negeri maupun swasta, sejak TK hingga perguruan tinggi, agar tertanam rasa, paham dan semangat kebangsaan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga.

2) Pemerintah bersama dengan instansi terkait, melaksanakan upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan menggunakan pakaian nasional dan dilanjutkan dengan pameran atau menyaksikan film-film dokumenter perjuangan bangsa.

3) Pemerintah bersama instansi terkait melaksanakan renungan suci dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan kepada para arwah pahlawan pejuang kemerdekaan bangsa.

4) Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, melaksanakan berbagai lomba, baik karya tulis ilmiah termasuk lomba karya tulis territorial dengan jangkauan lebih luas maupun olahraga "napak tilas" dalam bentuk *longsmarch* atau lainnya.

5) Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta menerbitkan buku-buku sejarah maupun lainnya yang bersifat membangkitkan wawasan kebangsaan dan dibarengi dengan buku-buku pengetahuan umum, baik manajemen pemerintahan maupun bacaan umum dalam bentuk paket murah, sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

6) Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, mengadakan penyuluhan atau penyebarluasan berbagai informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik dan pelayanan perpustakaan umum, perpustakaan keliling, mobil pintar sebagaimana yang digalang oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono hingga ke pelosok tanah air tentang perkembangan pemerintah daerah maupun hal-hal lain yang bersifat membangkitkan jiwa nasionalisme bangsa, agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa terus dapat terjaga.

7) Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional bersama TNI Angkatan Laut mewujudkan pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan kelautan yang dikemas dalam Bina Juang Remaja Bahari (BJRB) setiap tahun sebagai sarana integrasi Negara kepulauan.

BAB VII

PENUTUP

27. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam pembinaan masyarakat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk menanggulangi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, harus dilakukan secara simultan, berkesinambungan dan terarah di seluruh komponen bangsa.
- b. Peningkatan pembinaan masyarakat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan untuk menghindari bahaya disintegrasi bangsa yakni dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
- c. Ideologi Pancasila merupakan seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.
- d. Kurangnya pengamalan terhadap ideologi Pancasila oleh masyarakat dapat terjadi, karena prinsip-prinsip dasar dan arah tujuan yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dipahami, dimengerti, dipergunakan dan dilaksanakan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
- e. Pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan terhadap nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, mutlak perlu diajarkan sejak usia dini melalui lembaga pendidikan formal maupun informal.

32. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat diberikan guna mewujudkan upaya pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, antara lain:

- a. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap komponen bangsa diperlukan perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara integratif. Untuk itu, perlu diwujudkan adanya suatu wadah atau lembaga yang akan menangani masalah Wawasan Kebangsaan serta perlunya buku pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- b. Peran para elit pemerintah, elit politik dan tokoh masyarakat LSM serta media massa sangat diperlukan untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Untuk itu para tokoh tersebut harus mempunyai komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan mengesampingkan pemikiran sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang.
- c. Perlunya pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui penataran atau sertifikasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), di seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, agar lebih tertanam rasa cinta tanah air, bangsa dan negara bahkan selalu siap dalam usaha bela negara.
- d. Perlunya penyegaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, di setiap Kabupaten atau Kota dengan melibatkan instansi terkait secara bertahap dan berlanjut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. A F. Stones James, *Management*, (dalam R. Sulistiyadi. Majalah Seskoal). Jilid I Edisi 1.
2. Buku Kewarganegaraan. *Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara*. Penerbit Yudhistira. Jakarta. 2005.
3. DR. J. KALOH, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* . PT Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
4. Jederal TNI (Purn) Edi Sudrajat, “ *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional : Satu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam*”. Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor II (3), Desember 1997.
5. Lemhannas. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Penerbit. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1992.
6. Samad Riyanto,Bibit. *Orasi Ilmiah. Optimalisasi Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Praktek Administrasi Negara*. (Naskah dalam wisuda Program Magister ke-7 dan Program Sarjana S1 ke-46 STIA LAN RI). Jakarta.2009.
7. Saile, Said. *Pemekaran Wilayah, Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Penerbit Restu Agung. Jakarta. 2009.
8. Undang-Undang Dasar 1945. Grafindo. 2004. Jakarta.

POLA PIKIR

AKTUALISASI PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

